



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## OPTIMALISASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM PENANGANAN PHK

**Dinar Wahyuni**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[dinar.wahyuni@dpr.go.id](mailto:dinar.wahyuni@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlanjut. Saat ini, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia dikabarkan melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya. Sepanjang tahun 2025, gelombang PHK mengalami peningkatan. Satudata Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bulan Januari hingga Juni 2025, sebanyak 42.385 pekerja mengalami PHK. Angka ini melonjak 32,19 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebanyak 32.064 orang.

PHK massal disebabkan sejumlah faktor, yaitu *pertama*, penurunan permintaan global yang dipicu kondisi pascapandemi dan faktor ekonomi makro yang menyebabkan berkurangnya produksi di berbagai industri manufaktur. *Kedua*, ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan yang cepat menyebabkan pengusaha ragu berinvestasi dan mengambil keputusan jangka panjang sehingga berujung pengurangan tenaga kerja sebagai langkah efisiensi. Sejumlah perusahaan juga memilih untuk memindahkan operasionalnya ke negara lain untuk menekan biaya tenaga kerja. Selain itu, kebijakan impor yang lebih longgar memperburuk kondisi industri dalam negeri karena produk lokal sulit bersaing dengan barang impor yang lebih murah. *Ketiga*, transformasi digital membawa perubahan operasional perusahaan. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam automasi industri menggantikan posisi yang sebelumnya dikerjakan tenaga kerja manusia, dan memaksa tenaga kerja untuk beradaptasi atau menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.

Transformasi ekonomi melalui hilirisasi yang diharapkan mendorong pertumbuhan industri manufaktur sehingga menyerap lebih banyak tenaga kerja, belum efektif mengatasi PHK karena membutuhkan waktu dan penyesuaian. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, Aviliani, menyatakan bahwa upaya pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri belum mampu menanggulangi isu PHK saat ini. Hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah lebih banyak berupa padat modal dibandingkan padat karya sehingga belum maksimal menyerap tenaga kerja. Hilirisasi seharusnya tidak berhenti pada mengejar nilai tambah, tetapi harus didorong menjadi produk akhir sehingga semakin banyak menciptakan industri pengolahan. Selain itu, satuan tugas (Satgas) PHK yang diinisiasi pemerintah untuk mengatasi masalah PHK juga belum terealisasi.

Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dalam mengatasi PHK massal. Langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka optimalisasi adalah *pertama*, menyusun program pelatihan dan pengembangan vokasi berbasis kebutuhan industri. Langkah awal dilakukan melalui penguatan balai latihan kerja (BLK) dengan program pelatihan berbasis keterampilan terkini, seperti digitalisasi dan industri kreatif. BLK dapat bekerja sama dengan perusahaan *start up* dan perusahaan teknologi untuk pelatihan digitalisasi. Dengan ketrampilan yang dimiliki, pekerja yang terancam PHK dapat beralih ke sektor lain yang lebih menjanjikan. *Kedua*, menyusun peta jalan transisi ketenagakerjaan nasional dengan mengidentifikasi sektor yang rentan PHK dan menetapkan jalur transisi tenaga kerja dari sektor rentan ke sektor pertumbuhan. Selain itu, *mapping* perusahaan yang kekurangan tenaga kerja untuk dihubungkan dengan tenaga kerja yang terkena PHK juga perlu dilakukan.

*Ketiga*, memberikan keringanan pajak dan kemudahan regulasi bagi perusahaan yang berkomitmen menjaga jumlah tenaga kerja dan menyerap tenaga kerja terdampak PHK. Subsidi upah juga perlu dioptimalkan sehingga membantu perusahaan bertahan tanpa harus melakukan PHK massal. Namun, mekanisme pengawasan yang ketat harus dijalankan agar subsidi tepat sasaran. *Keempat*, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan mendorong reindustrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, dan investasi berkualitas yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. *Kelima*, membentuk satgas PHK dengan melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan akademisi. Satgas PHK berfungsi menangani kasus, mencegah eskalasi, serta menyusun solusi jangka panjang yang kolaboratif.

## Atensi DPR

Masalah PHK massal perlu penanganan serius. DPR RI mempunyai peran penting dalam mendukung upaya tersebut. Beberapa langkah yang perlu dilakukan:

- Komisi IX DPR RI melalui fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah perlu mengawal program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri; mendorong penyusunan peta jalan transisi ketenagakerjaan nasional; memastikan pemberian insentif dan subsidi agar tepat sasaran; mengawal penciptaan lapangan kerja; dan mendorong pembentukan satgas PHK.
- Komisi IX DPR RI melalui fungsi anggaran perlu mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berujung pada PHK dan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan, termasuk penyerapan tenaga kerja dan perlindungan sosial.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 27 Juli 2025;  
detiknews.com, 6 September 2025;  
indonesia.id, 15 Mei 2025;  
tempo.co, 2 Mei 2023 & 7 September 2025.

Minggu ke-1 September  
(1 s.d. 7 September 2025)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*